



PERAN PENDIDIKAN POLITIK DAN EFIKASI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT

Asep Somanteri¹, Aludin²

^{*12}Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara Cianjur

^{*}Corresponding author: dosenasepsomantri@gmail.com

Informasi Artikel:

Terima: 14-04-2026

Revisi: 20-04-2026

Disetujui: 25-05-2026

ABSTRAK

Partisipasi politik merupakan indikator utama keberhasilan demokrasi, namun tantangan seperti rendahnya kepercayaan publik, praktik politik uang, dan apatisme masyarakat masih menjadi hambatan serius, khususnya di wilayah pedesaan seperti Cianjur Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan politik dan efikasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 150 responden di wilayah Cianjur Selatan melalui teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik dengan nilai koefisien jalur 0,472. Demikian pula, efikasi politik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik dengan nilai koefisien sebesar 0,474. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan kontribusi sebesar 85,2% terhadap variansi partisipasi politik masyarakat, sementara model penelitian menunjukkan tingkat kecocokan yang sangat baik (*very good fit*) dengan nilai SRMR sebesar 0,046. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara peningkatan pemahaman politik melalui pendidikan yang terstruktur serta penguatan kepercayaan diri politik (efikasi) masyarakat adalah kunci utama dalam mendorong keterlibatan warga secara aktif dan rasional dalam proses demokrasi di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Efikasi Politik, Partisipasi Politik, Cianjur Selatan.

ABSTRACT

Political participation is a primary indicator of democratic success; however, challenges such as low public trust, money politics, and public apathy remain serious obstacles, particularly in rural areas like South Cianjur. This research aims to analyze the influence of political education and political efficacy on public political participation. Using an explanatory quantitative approach, data were collected from 150 respondents in the South Cianjur region through purposive sampling techniques. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) method with SmartPLS 4 software. The research results show that political education has a positive and significant effect on political participation, with a path coefficient of 0.472 and a p-value of 0.000. Similarly, political efficacy is proven to have a positive and significant effect on political participation, with a coefficient value



of 0.474 and a p-value of 0.000. Simultaneously, these two variables contribute 85.2% to the variance of public political participation, while the research model demonstrates a very good fit with an SRMR value of 0.046. These findings emphasize that the synergy between increasing political understanding through structured education and strengthening public political self-confidence (efficacy) is the key to encouraging active and rational citizen engagement in the democratic process at the grassroots level.

Keywords: Political Education, Political Efficacy, Political Participation, South Cianjur.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila menjunjung tinggi demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat (Hakim et al., 2025; Panggabean et al., 2026). Dalam sistem ini, partisipasi politik masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan demokrasi, yang mencakup keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan hingga pelaksanaan dan penilaian (Hakim et al., 2025). Partisipasi yang tinggi mencerminkan proses pemilihan umum (pemilu) yang berkualitas, sementara rendahnya partisipasi sering kali menjadi sinyal buruk bagi kesehatan demokrasi suatu bangsa (Nopriani, 2025).

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan tantangan yang kompleks. Rendahnya partisipasi politik sering dipicu oleh penurunan kepercayaan publik akibat maraknya kasus korupsi dan janji kampanye yang tidak terpenuhi. Selain itu, praktik *money politic* (politik uang) telah mencederai prinsip dasar demokrasi dengan mengubah kompetisi gagasan menjadi transaksi material (Simamora et al., 2025). Masyarakat cenderung menjadi apatis dan skeptis karena merasa suara mereka tidak memiliki pengaruh signifikan dibandingkan kekuatan uang, yang pada akhirnya menggerogoti stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan (Khoirunisa et al., 2026; Simamora et al., 2025). Di wilayah seperti Cianjur Selatan, karakteristik geografis dan sosial-ekonomi masyarakat sering kali membuat mereka rentan terhadap pengaruh eksternal dan kurangnya akses terhadap informasi politik yang memadai (Fatimah et al., 2026). Pendidikan politik hadir sebagai solusi strategis untuk membekali warga negara dengan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan kritis dalam berpartisipasi. Melalui pendidikan politik yang efektif, masyarakat diharapkan mampu menilai visi-misi kandidat secara rasional dan menolak manipulasi politik (Prasetyo, 2026). Akan tetapi, terdapat gap riset (celah penelitian) di mana banyak studi menyebutkan bahwa pendidikan politik tidak selalu berpengaruh langsung secara signifikan terhadap partisipasi politik (Lidya, 2018; Nursaid, 2020). Terdapat ketidakkonsistenan pengaruh pendidikan politik yang menunjukkan perlunya variabel perantara.

Di sinilah pentingnya efikasi politik, yaitu perasaan individu bahwa tindakan politiknya memiliki dampak pada proses politik (Wulandari, 2025). Penelitian membuktikan bahwa pendidikan politik mampu meningkatkan efikasi politik, dan efikasi inilah yang kemudian mendorong partisipasi (Hidayat, 2024). Namun, peran efikasi politik ini dapat bervariasi di setiap daerah, tergantung pada daya tanggap pemerintah lokal dan pengalaman politik masyarakatnya

(Fauzi & Gumuruh, 2025; Wulandari, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan lokus di Cianjur Selatan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pemilihan pemula di lingkungan sekolah atau mahasiswa di perkotaan besar. Dengan mengambil lokus di Cianjur Selatan yang memiliki dinamika sosial-politik masyarakat pedesaan dan pinggiran, penelitian ini menawarkan perspektif berbeda mengenai bagaimana struktur efikasi politik terbentuk di luar lingkungan akademis formal. Selain itu, penggunaan variabel efikasi politik sebagai mediator untuk menguji kembali "kekosongan" hubungan antara pendidikan politik dan partisipasi pada masyarakat umum di wilayah tersebut memberikan kontribusi model hubungan yang lebih spesifik.

Urgensi penelitian ini sangat mendesak mengingat semakin dekatnya siklus politik yang menuntut kesiapan masyarakat sebagai pemilih cerdas. Tanpa adanya pemahaman dan efikasi politik yang kuat, masyarakat Cianjur Selatan berisiko terus terjebak dalam pola politik transaksional yang merugikan pembangunan jangka panjang. Penelitian ini penting untuk merumuskan strategi pendidikan politik yang inklusif dan adaptif agar mampu meningkatkan kepercayaan diri politik masyarakat (efikasi) sehingga mereka menjadi aktor utama dalam menentukan arah kebijakan daerah, bukan sekadar objek mobilisasi politik. Sinergi antara pendidikan politik yang terstruktur dan peningkatan efikasi diri adalah kunci untuk memperkuat demokrasi dari tingkat akar rumput.

LANDASAN TEORI

Pendidikan Politik

Pendidikan politik didefinisikan sebagai pembinaan yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai fenomena politik (Hidayah et al., 2020)(Endrina et al., 2024). Tujuannya adalah membentuk warga negara yang memiliki kebebasan otonom, rasa cinta tanah air, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip sistem politik guna mewujudkan tujuan bernegara (Endrina et al., 2024). Menurut Endrina et al. (2024), pendidikan politik memiliki lima fungsi utama: mendidik individu menjadi warga negara yang baik, menumbuhkan etika dan tanggung jawab politik, membangun pemahaman kritis terhadap lingkungan, melatih kemampuan analisis konflik, dan memfasilitasi partisipasi melalui refleksi konstruktif (Prasetyo, 2026).

Dalam implementasinya, pendidikan politik mencakup tiga ranah utama: kognitif (pengetahuan tentang demokrasi dan hak warga negara), afektif (penanaman nilai seperti toleransi dan kemandirian), serta psikomotorik (keterlibatan aktif) (Panggabean et al., 2026). Di lingkungan formal, pendidikan politik sering diintegrasikan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan pendekatan interaktif, diskusi isu aktual, dan pelatihan keterampilan analisis kritis (Husna & Fahrimal, 2021). Selain itu, jalur ekstrakurikuler seperti organisasi siswa (OSIM) menjadi sarana habituasi di mana masyarakat belajar mekanisme demokrasi seperti kampanye dan penyampaian visi-misi. Pendidikan politik yang efektif diharapkan mampu menciptakan pemilih cerdas yang mampu menilai kandidat berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar



propaganda. Hal ini krusial untuk mencegah praktik negatif seperti *money politic* yang dapat merusak kualitas demokrasi (Husna & Fahrimal, 2021).

Efikasi Politik

Efikasi politik merupakan keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya untuk memahami, memengaruhi, dan berpartisipasi dalam proses politik (Devi et al., 2019). Konsep ini terdiri atas dua dimensi, yaitu efikasi politik internal dan efikasi politik eksternal (Wulandari, 2025). Efikasi politik internal berkaitan dengan kepercayaan seseorang terhadap kapasitas dirinya dalam memahami isu-isu politik serta mengambil bagian dalam aktivitas politik. Keyakinan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman keberhasilan (*mastery experience*), persuasi verbal dari lingkungan, serta kondisi fisiologis dan afektif individu yang membentuk rasa percaya diri dalam berpartisipasi (Groskurth et al., 2021). Sementara itu, efikasi politik eksternal merujuk pada persepsi individu mengenai sejauh mana pemerintah, politisi, dan lembaga negara bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat serta memberikan ruang bagi warga untuk memengaruhi kebijakan publik (Groskurth et al., 2021; Wulandari, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap efikasi politik karena meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan politik. Individu dengan efikasi politik yang tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu, diskusi publik, maupun aktivisme digital, sedangkan efikasi yang rendah sering kali mendorong sikap apatis dan kecenderungan untuk tidak terlibat dalam proses politik (Groskurth et al., 2021; Saud et al., 2020).

Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik, mulai dari pembuatan keputusan, pelaksanaan, hingga penilaian kebijakan (Tatang et al., 2018). Menurut Huntington dan Nelson dalam (Syarif, 2016; Wulandari, 2025), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sebagai individu yang dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Bentuknya dapat berupa kegiatan konvensional seperti memilih dalam pemilu (*voting*), bergabung dalam partai politik, dan menghadiri rapat umum, maupun interaksi langsung dengan pejabat terpilih (Tatang et al., 2018). Milbrath dan Goel mengategorikan partisipan ke dalam empat golongan: Apatis (menarik diri), Spektator (sekadar memilih), Gladiator (aktif terlibat), dan Pengkritik (Tatang et al., 2018).

Di era digital, muncul fenomena partisipasi politik di media sosial, yaitu ekspresi dan aksi online untuk menanggapi isu politik (Saud et al., 2020). Hal ini mencakup empat aspek: *latent engagement* (mencari informasi), *follower engagement* (mengikuti akun politik), *expressive engagement* (berbagi opini/meme), dan *counter engagement* (keterlibatan kontra). Partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti efikasi politik dan nilai-nilai pribadi (*personal values*) (Devi et al., 2019; Saud et al., 2020; Tatang et al., 2018). Partisipasi yang sehat dicirikan oleh kesadaran kritis dan aksi berbasis bukti, sementara partisipasi yang berlebihan dan negatif dapat memicu fanatisme, penyebaran hoaks, serta polarisasi yang mengancam kohesi sosial (Anggraini, 2025; Prayugo & Prayitno, 2022). Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat

merupakan indikator utama keberhasilan sistem demokrasi, di mana warga negara bertindak sebagai aktor utama, bukan sekadar objek mobilisasi politik.

Pengembangan Hipotesis

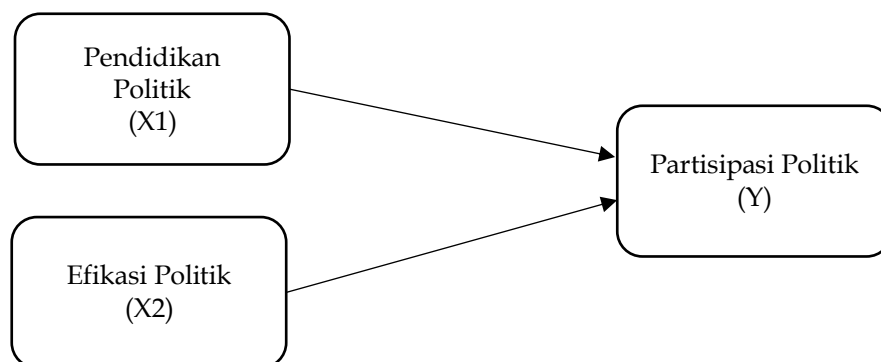
Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan warga negara mengenai kehidupan politik sehingga mereka mampu berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan demokratis (Julianto et al., 2019; Prayugo & Prayitno, 2022). Pendidikan politik tidak hanya memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis dalam menilai kebijakan publik, program pemerintah, maupun visi dan misi para aktor politik (Endrina et al., 2024). Semakin baik pendidikan politik yang diterima masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran mereka mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses politik sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi (Lidya, 2018; Nursaid, 2020). Individu yang memiliki pemahaman politik yang memadai cenderung tidak mudah terpengaruh oleh politik transaksional, hoaks, maupun manipulasi informasi, sehingga mampu menentukan pilihan politik secara rasional (Endrina et al., 2024). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan politik berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas politik, seperti mengikuti pemilihan umum, menghadiri forum musyawarah, menyampaikan aspirasi, maupun mengawasi jalannya pemerintahan (Azhari et al., 2025; Karmila, 2020). Dalam konteks pembangunan politik daerah, pendidikan politik menjadi instrumen penting untuk mendorong masyarakat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan politik masyarakat, semakin tinggi pula partisipasi politik yang ditunjukkan dalam berbagai aktivitas demokrasi (Karmila, 2020; Saud et al., 2020; Tatang et al., 2018).

Pengaruh Efikasi Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat

Efikasi politik merupakan keyakinan individu bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memahami isu-isu politik serta memengaruhi proses dan kebijakan politik melalui tindakan yang dilakukan (Devi et al., 2019; Wulandari, 2025). Konsep ini mencakup dimensi efikasi politik internal, yaitu kepercayaan terhadap kemampuan diri dalam berpartisipasi, dan efikasi politik eksternal, yaitu keyakinan bahwa pemerintah maupun lembaga politik bersedia merespons aspirasi masyarakat (Groskurth et al., 2021; Wulandari, 2025). Individu yang memiliki efikasi politik tinggi akan merasa bahwa keterlibatan mereka memiliki arti dan mampu memberikan perubahan terhadap proses politik (Groskurth et al., 2021; Wulandari, 2025). Sebaliknya, masyarakat dengan efikasi politik rendah cenderung bersikap apatis, enggan menggunakan hak pilih, serta kurang berpartisipasi dalam kegiatan politik maupun pembangunan daerah (Prayugo & Prayitno, 2022; Wulandari, 2025). Berdasarkan teori efikasi diri Bandura, keyakinan terhadap kemampuan diri merupakan faktor utama yang mendorong munculnya perilaku nyata (Azhari et al., 2025; Saud et al., 2020). Dalam konteks politik, keyakinan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam pemilu, penyampaian aspirasi,

keterlibatan dalam musyawarah pembangunan, pengawasan kebijakan publik, maupun aktivitas politik digital. Sejumlah penelitian empiris juga menunjukkan bahwa efikasi politik merupakan prediktor penting partisipasi politik karena mampu meningkatkan motivasi individu untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh sebab itu, semakin tinggi efikasi politik masyarakat, semakin besar kecenderungan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan politik daerah (Hidayat, 2024; Widiyanto et al., 2026; Wulandari, 2025).



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan menguji hubungan kausal antara pendidikan politik dan efikasi politik sebagai variabel independen terhadap partisipasi politik masyarakat sebagai variabel dependen (Rizky Maulana et al., 2025; Setiadi et al., 2025). Penelitian dilakukan pada masyarakat di wilayah Cianjur Selatan, dengan responden yang merupakan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Cianjur Selatan. Karena jumlah populasi yang besar dan tidak diketahui secara pasti, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria responden meliputi: (1) berusia minimal 17 tahun atau telah menikah sehingga memiliki hak pilih; (2) berdomisili di wilayah Cianjur Selatan minimal satu tahun; (3) pernah mengikuti atau memiliki pengalaman dalam kegiatan politik, seperti pemilu, pemilihan kepala daerah, musyawarah desa, atau bentuk partisipasi politik lainnya; dan (4) bersedia menjadi responden penelitian. Jumlah sampel mengacu pada rekomendasi Hair et al. (2022), yaitu minimal 5–10 kali jumlah indikator penelitian. Dengan estimasi sekitar 15 indikator, jumlah sampel yang digunakan berkisar 150 responden sehingga memenuhi persyaratan analisis Structural Equation Modeling (SEM) (Abu et al., 2021). Pengambilan data Kuantitatif melalui penyebaran kuesioner (Google Form) berbasis skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju sampai 5 = Sangat Setuju).

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4 (Maulana et al., 2025; Maulana

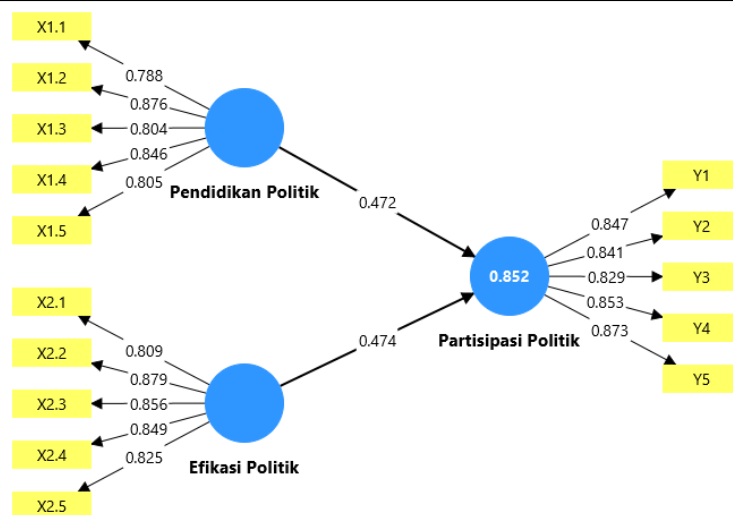


Rizky et al., 2025;Setiadi, 2026). Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaruh Perilaku Birokrasi dan Kompetensi terhadap Kualitas Pelayanan. Dalam SEM-PLS, analisis dilakukan melalui dua model, yaitu outer model dan inner model. Outer model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator. Validitas diukur melalui convergent validity (loading factor $> 0,7$) dan discriminant validity ($AVE > 0,5$). Reliabilitas dinilai dengan composite reliability dan Cronbach's Alpha, dengan nilai $> 0,7$. Inner model digunakan untuk melihat hubungan antar variabel laten, melalui nilai path coefficient dan R-Square (R^2) untuk menilai kekuatan model. Kesesuaian model dilihat dari nilai Goodness of Fit, terutama SRMR, dengan kriteria $< 0,10$ (fit) dan $< 0,08$ (perfect fit). Kemudian pengujian hipotesis dilakukan dengan bootstrapping. Hipotesis diterima jika nilai t-statistik $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$ (Maulana et al., 2025;Mafriningsianti & Setiadi, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pengukuran (*outer model*) merupakan tahapan analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas instrumen penelitian melalui pengujian validitas dan reliabilitas. Model ini menjelaskan hubungan antara indikator-indikator penelitian dengan konstruk laten yang diwakilinya sehingga dapat diketahui sejauh mana setiap indikator mampu merefleksikan variabel yang diukur (Maulana Rizky, Alhidayatullah, 2025; Setiadi, Sandi; Alhidayatullah; Maulana, 2025). Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan (Alareqe et al., 2022).

Validitas konvergen menjadi salah satu persyaratan utama dalam analisis menggunakan SmartPLS karena menunjukkan tingkat keterkaitan antara indikator dengan konstraknya (Carlos Rodr' Igue et al., 2024). Pengujian dilakukan melalui nilai *loading factor*, yang mencerminkan besarnya korelasi setiap indikator terhadap konstruk laten. Indikator dinyatakan memenuhi validitas apabila memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70. Selain itu, validitas konvergen juga dievaluasi melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE), dengan kriteria lebih besar dari 0,50. Hasil hubungan antar konstruk beserta nilai *loading factor* setiap indikator disajikan pada Gambar 2 :



Gambar 2. Outer Model
Sumber: diolah SMART PLS4 (2026)

Hasil pada Gambar 2 menampilkan pengujian validitas konvergen berdasarkan analisis menggunakan perangkat lunak PLS. Penilaian dilakukan melalui nilai loading factor setiap indikator pada konstruk penelitian. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai loading factor di atas 0,70 serta Average Variance Extracted (AVE) lebih besar dari 0,50. Berdasarkan hasil analisis, seluruh indikator memenuhi kriteria tersebut sehingga layak digunakan pada tahap analisis selanjutnya.

Tabel 1. Loading Faktor Akhir

Variabel (Simbol)	Indikator	Loading Factor	Note
Pendidikan Politik (X1)	X1.1	0.788	Valid
	X1.2	0.876	Valid
	X1.3	0.804	Valid
	X1.4	0.846	Valid
	X1.5	0.805	Valid
Efikasi Politik (X2)	X2.1	0.809	Valid
	X2.2	0.879	Valid
	X2.3	0.856	Valid
	X2.4	0.849	Valid
	X2.5	0.825	Valid
Partisipasi Politik (Y)	Y1	0.847	Valid
	Y2	0.841	Valid
	Y3	0.829	Valid
	Y4	0.853	Valid
	Y5	0.873	Valid

Sumber : Data diolah Peneliti (2026)

Tabel 1, informasi tentang hasil Loading Factor pada setiap variabel manifest menunjukkan bahwa semua indikator terhadap variabel laten memiliki nilai lebih dari 0,70, sehingga indikator tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2. Nilai AVE

Variabel	Nilai AVE
Perilaku Birokrasi	0.712
Kompetensi	0.721
Kualitas Pelayanan	0.680

Sumber : Data diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2, seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas batas minimum sebesar 0,50. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria validitas konvergen, sehingga mampu menjelaskan varians indikatornya secara memadai. Dengan demikian, setiap indikator yang digunakan terbukti memiliki keterkaitan yang kuat dengan konstruk laten yang diwakilinya. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam mengukur konsep yang diteliti sesuai dengan model yang dikembangkan. Oleh karena itu, seluruh variabel dan indikator dinyatakan layak digunakan sebagai dasar dalam analisis struktural selanjutnya karena telah memenuhi persyaratan validitas konvergen yang ditetapkan.

1) *Discriminant Validity*

Pengujian validitas diskriminan dilakukan menggunakan nilai *cross loading* dan perbandingan nilai AVE dengan korelasi antar konstruk laten (Prakoso & Setiadi, 2026). Validitas diskriminan dinyatakan terpenuhi apabila setiap indikator memiliki korelasi yang lebih tinggi terhadap konstruk asalnya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Hasil pengujian *cross loading* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Cross Loading Factor

Indikator	Pendidikan Politik (X1)	Efikasi Politik (X2)	Partisipasi Politik (Y)
X1.1	0.788	0.696	0.696
X1.2	0.876	0.817	0.798
X1.3	0.804	0.715	0.722
X1.4	0.846	0.766	0.761
X1.5	0.805	0.734	0.732
X2.1	0.754	0.809	0.746
X2.2	0.793	0.879	0.800
X2.3	0.791	0.856	0.777
X2.4	0.729	0.849	0.742
X2.5	0.754	0.825	0.735
Y1	0.780	0.784	0.847
Y2	0.725	0.752	0.841
Y3	0.739	0.743	0.829
Y4	0.794	0.776	0.853
Y5	0.782	0.767	0.873

Sumber : Data diolah Peneliti (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai *cross loading* yang lebih tinggi pada konstruk laten yang diwakilinya dibandingkan dengan konstruk laten lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa masing-masing indikator mampu merefleksikan konstruk yang diukur secara tepat, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria *discriminant validity* dan layak digunakan dalam pengukuran variabel laten.

1. Uji Reliabilitas

Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha (CA) merupakan dua cara yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas Partial Least Square (PLS):

Tabel 4. CA dan CR

Variabel	CA	CR	Kesimpulan
Pendidikan Politik	0.899	0.900	Reliabel
Efikasi Politik	0.903	0.904	Reliabel
Partisipasi Politik	0.882	0.884	Reliabel

Sumber : Data diolah Peneliti (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang baik, sehingga seluruh indikator dinilai konsisten dalam mengukur konstruk yang diteliti. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai Composite Reliability (CR) yang berada di atas batas minimum 0,70 serta nilai Cronbach's Alpha (CA) yang melebihi 0,60. Selanjutnya, evaluasi model struktural (inner model) dilakukan untuk menguji hubungan antarvariabel laten dalam model penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis nilai koefisien jalur (*path coefficient*) melalui prosedur *bootstrapping* guna mengetahui arah dan tingkat signifikansi pengaruh antarvariabel yang diuji.

Tabel 5. Hasil R Square

Variabel	R-square	R-square adjusted
Partisipasi Politik	0.852	0.850

Sumber : Data diolah Peneliti (2026)

R-square dihitung pada variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *R-square* untuk Keberlanjutan Bisnis sebesar 0,798, yang berarti Pendidikan Politik dan Efikasi Politik memberikan kontribusi sebesar 85,2% terhadap variabel tersebut. Artinya bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediksi yang kuat, sehingga variabel-variabel yang diteliti berperan signifikan dalam memengaruhi Partisipasi Politik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Selanjutnya, Penilaian Goodness of fit (GoF), kriteria goodness of fit model jika nilai SRMR < 0,10 dan model dinyatakan perfect fit jika nilai SRMR < 0,08. Ini menunjukkan bahwa model tersebut dapat diterima dan berfungsi dengan baik dalam menggambarkan hubungan dalam data yang digunakan. yang berarti bahwa model tersebut sangat baik dalam mencocokkan data tanpa banyak residual yang berarti (Imtihansyah et al., 2024; Legate et al., 2023; Setiadi et al., 2025).

Tabel 6. Q-Square

Variabel	Saturated model	Estimated model
SRMR	0.046	0.046

Sumber : Data diolah Peneliti (2026)

Hasil pengujian Goodness of Fit (GoF) menunjukkan bahwa nilai Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) sebesar 0,046. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki tingkat kecocokan yang sangat baik, karena berada di bawah batas penerimaan $SRMR \leq 0,05$, yang menunjukkan kategori *very good fit*. Dengan demikian, selisih antara matriks kovarian hasil observasi dengan matriks kovarian yang diprediksi oleh model tergolong sangat kecil. Kondisi ini menandakan bahwa model yang dibangun telah mampu merepresentasikan data empiris secara memadai dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktural antarvariabel dalam penelitian, yaitu perilaku birokrasi, kompetensi, dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, model yang digunakan dapat dinyatakan memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dalam menggambarkan hubungan antarvariabel yang diteliti.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan setelah seluruh indikator memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Proses pengujian menggunakan teknik bootstrapping pada perangkat lunak SmartPLS 4, yang memiliki keunggulan karena tidak mensyaratkan data berdistribusi normal maupun ukuran sampel yang besar (Xu et al., 2023; Setiadi et al., 2025). Evaluasi hipotesis didasarkan pada nilai koefisien jalur (path coefficient), t-statistics, dan p-values untuk mengidentifikasi arah, kekuatan, serta signifikansi hubungan antarvariabel. Selain itu, besarnya koefisien parameter digunakan sebagai dasar dalam menilai tingkat pengaruh masing-masing variabel dalam model penelitian.

Tabel 6. Uji Signifikan Jalur (Path)

Hubungan	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values
Pendidikan Politik -> Partisipasi Politik	0.472	5.860	0.000
Efikasi Politik -> Partisipasi Politik	0.474	5.891	0.000

Sumber : Data diolah Peneliti (2026)

Peneliti menerapkan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Untuk hipotesis dua arah, nilai Path Coefficient yang diindikasikan oleh nilai t-statistik harus melebihi 1,96. Berdasarkan Path Coefficient dan t-statistik, serta tabel yang tersedia, dapat disimpulkan pengaruh langsung sebagai berikut:

Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik (H1)

Berdasarkan Tabel 6, hubungan Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik memperoleh nilai koefisien jalur (original sample) sebesar 0,472, dengan t-statistics sebesar 5,860 dan p-values sebesar 0,000. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa pendidikan politik



memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat. Selain itu, nilai *t-statistics* yang lebih besar dari 1,96 dan *p-values* yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, Hipotesis 1 (H1) diterima, yang berarti semakin tinggi tingkat pendidikan politik masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya.

Pengaruh Efikasi Politik terhadap Partisipasi Politik (H2)

Berdasarkan hasil analisis, hubungan Efikasi Politik terhadap Partisipasi Politik menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,474, *t-statistics* sebesar 5,891, dan *p-values* sebesar 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa efikasi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi keyakinan masyarakat terhadap kemampuan dirinya dalam memahami serta memengaruhi proses politik, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik. Oleh karena itu, Hipotesis 2 (H2) diterima.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,472. Temuan ini memperkuat landasan teori dan penelitian terdahulu oleh Lidya (2018) serta Nursaid (2020) yang menyatakan bahwa peningkatan pemahaman politik secara sistematis akan berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis dalam menilai kebijakan publik dan visi-misi aktor politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Karmila (2020) bahwa pendidikan politik yang efektif berkontribusi dalam membentuk pemilih cerdas yang rasional dan mampu menolak praktik politik transaksional maupun hoaks.

Selaras dengan hal tersebut, efikasi politik juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam mendorong partisipasi politik dengan nilai koefisien sebesar 0,474. Hasil ini secara empiris mendukung penerapan teori efikasi diri dari Bandura dalam konteks politik, di mana keyakinan terhadap kemampuan diri merupakan faktor utama yang mendorong munculnya perilaku nyata. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Azhari et al. (2025) dan Saud et al. (2020) yang menunjukkan bahwa individu dengan efikasi politik tinggi akan merasa keterlibatan mereka memiliki arti dan mampu memberikan perubahan pada proses politik. Sebaliknya, penelitian ini mengonfirmasi argumen Prayugo & Prayitno (2022) bahwa rendahnya efikasi politik cenderung menciptakan sikap apatis dan keengganan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Secara keseluruhan, variabel pendidikan politik dan efikasi politik memberikan kontribusi sebesar 85,2% terhadap partisipasi politik masyarakat, yang mengindikasikan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat kuat. Keberhasilan pengujian hipotesis ini sekaligus menjawab celah penelitian (research gap) terkait adanya ketidakkonsistenan pengaruh pendidikan politik pada beberapa studi terdahulu. Dengan



mengambil lokus di Cianjur Selatan, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa struktur efikasi politik dapat terbentuk kuat di lingkungan masyarakat pedesaan dan pinggiran melalui sinergi pendidikan politik yang terstruktur, sehingga masyarakat mampu bertindak sebagai aktor utama pembangunan dan bukan sekadar objek mobilisasi politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Cianjur Selatan, ditemukan bahwa pendidikan politik memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat, yang mendukung teori bahwa proses pembelajaran politik mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan kritis warga negara. Temuan ini memperkuat argumen dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin baik pendidikan politik yang diterima, maka semakin tinggi kesadaran individu untuk terlibat aktif dalam demokrasi dan tidak sekadar menjadi objek mobilisasi. Pendidikan politik yang efektif terbukti mampu membentuk pemilih cerdas yang rasional dalam menilai visi-misi kandidat serta memiliki ketahanan terhadap praktik politik uang dan penyebaran hoaks. Hasil ini sekaligus menjawab celah penelitian sebelumnya yang sempat menunjukkan ketidakkonsistenan pengaruh pendidikan politik, dengan membuktikan bahwa di wilayah pedesaan, pemahaman politik tetap menjadi fondasi utama bagi keterlibatan warga.

Selain faktor pendidikan, efikasi politik juga terbukti berpengaruh positif dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, di mana keyakinan individu atas kemampuannya memengaruhi proses politik menjadi pendorong utama munculnya perilaku nyata. Hal ini selaras dengan penerapan teori efikasi diri dari Bandura yang memposisikan kepercayaan diri sebagai motor penggerak tindakan individu. Sejalan dengan studi terdahulu, masyarakat yang memiliki perasaan bahwa tindakan politik mereka memiliki dampak nyata cenderung lebih aktif dalam pemilu maupun pengawasan kebijakan publik. Sebaliknya, temuan ini juga memvalidasi bahwa rendahnya efikasi politik dapat memicu sikap apatis dan skeptisisme terhadap lembaga negara. Dengan diterimanya hipotesis ini, penelitian mengonfirmasi bahwa rasa percaya diri politik merupakan prediktor penting yang memotivasi individu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.

Secara keseluruhan, sinergi antara pendidikan politik yang terstruktur dan peningkatan efikasi diri menjadi kunci utama untuk memperkuat demokrasi di tingkat akar rumput. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan mengambil lokus di wilayah pedesaan dan pinggiran, yang menunjukkan bahwa struktur efikasi politik dapat terbentuk kuat di luar lingkungan akademis formal jika didukung oleh akses informasi yang memadai. Keberhasilan model ini dalam menjelaskan partisipasi politik masyarakat menegaskan bahwa penguatan kapasitas intelektual dan mental warga negara adalah langkah mendesak guna menciptakan ekosistem politik yang sehat. Melalui strategi pendidikan yang inklusif, masyarakat dapat bertransformasi menjadi aktor utama yang menentukan arah kebijakan daerahnya sendiri.



REFERENSI

- Abu, F., Saman, M. Z. M., Garza-Reyes, J. A., Gholami, H., & Zakuan, N. (2021). Challenges in the Implementation of Lean Manufacturing in the Wood and Furniture Industry. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 33(1), 103–123. <https://doi.org/10.1108/jmtm-01-2021-0029>
- Alareqe, N. A., Hassan, S. A., Kamarudin, E. M. E., Aljaberi, M. A., Nordin, M. S., Ashureay, N. M., & Mohammed, L. A. (2022). Validity of Adult Psychopathology Model Using Psychiatric Patient Sample From a Developing Country: Confirmatory Factor Analysis. *Mental Illness*, 2022, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2022/9594914>
- Anggraini, S. I. (2025). *Tantangan Demokrasi Pancasila di era digital : Menganalisis dampak penyebaran hoaks , disinformasi , dan polarisasi di media sosial terhadap nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial*. 3, 221–231.
- Azhari, S., Wibawani, S., & Millensyah, E. W. (2025). *Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Generasi Z pada Pilkada Serentak 2024*. 6(4), 3190–3196.
- Carlos Rodr Íguez, J., Van Der Merwe, J., Aditiya Prabowo, D., Muarif Wahid, S., & Putra Cesna, G. (2024). Improving Natural Resource Management through AI: Quantitative Analysis using SmartPLS. *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*, 2(2), 135–142. <https://doi.org/10.33050/italic.v2i2.548>
- Devi, N., Psikologi, P. S., Kedokteran, F., & Sriwijaya, U. (2019). *HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN JEJARING SOSIAL DENGAN EFIKASI POLITIK PADA MAHASISWA UNIVERSITAS SRIWIJAYA DALAM PEMILIHAN UMUM 2019*.
- Endrina, D., Mendrofa, K., Pamulang, U., Tinggi, S., Pemerintahan, I., Negara, A., & Politik, P. (2024). *ANALISIS PENTINGNYA PENDIDIKAN POLITIK*. 2.
- Fatimah, N. H., Andira, A., Azizah, N. N., Fadillah, S., & Salsabila, Z. A. (2026). *Analisis Strategi Pemerataan Infrastruktur Wilayah Berbasis Spasial untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah di Kabupaten Cianjur*. 11(April), 88–105.
- Fauzi, A. M., & Gumuruh, A. R. (2025). *Studi Identifikasi Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemilih Di Kelurahan Singotrunan Dalam Pilkada Tahun 2024*. 11(2), 137–142.
- Groskurth, K., Nießen, D., Rammstedt, B., & Lechner, C. M. (2021). *Political Efficacy Short Scale*.
- Hakim, M. N., Studi, P., Hukum, I., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Islam, U., & Walisongo, N. (2025). *KONTEKS DEMOKRASI PANCASILA (Praktik Golput pada Pemilu 2014 , 2019 , dan 2024 di Indonesia)* SKRIPSI ii.
- Hidayah, N., Kabupaten, A., Laut, T., Selatan, P. K., Studi, P., & Indonesia, P. (2020). *TERCAPAINYA PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN BAGI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN*.
- Hidayat, A. W. A. (2024). *Riset Mahasiswa Ungkap Peran Literasi Digital dan Efikasi Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z*.
- Husna, A., & Fahrimal, Y. (2021). *Pendidikan Politik : Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya*. 3(1), 85–100.
- Imtihansyah, R., Prayoga, H. D., Tomoliyus, T., Sukamti, E. R., Amalia, B., Prabowo, T. A., Fitrianto, A. T., & Fauzi, F. (2024). The Impact of Parental Support on Performance Achievement through Achievement Motivation in Elite Athletes in South Kalimantan, Indonesia: A Cross-Sectional Study with Structural Equation Modeling Analysis. *Retos*, 57, 346–354. <https://doi.org/10.47197/retos.v57.105996>



- Julianto, A., Jaminie, F., & Teguh Prakoso, C. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BERAU. *Jurnal Administrasi Negara*, 7, 9073–9085.
- Karmila, M. (2020). PENGARUH PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK GENERASI Z PADA PEMILU TAHUN 2020 DI KOTA MAKASSAR.
- Khoirunisa, A. D., Zahra, A. A., Rosa, A., & Santoso, R. (2026). *Menurunnya Kepercayaan Publik akibat Krisis Etika Politik di Pemerintahan Indonesia*. 4(3), 906–921.
- Legate, A. E., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2023). PLS-SEM: A method demonstration in the R statistical environment. *Human Resource Development Quarterly*, 35(4), 501–529. <https://doi.org/10.1002/hrdq.21517>
- Lidya. (2018). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PARTISIPASI POLTIK DALAM PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DESA KECAMATAN SINGKIL UTARA.
- Mafriningsianti, E., & Setiadi, S. (2026). OPTIMIZING COMMUNITY PARTICIPATION TO STRENGTHEN COLLABORATIVE GOVERNANCE IN ADDRESSING URBAN ISSUES IN BEKASI. 3(3).
- Maulana, R., Alhidayatullah, A., & Setiadi, S. (2025). MSME Sustainability Strategy Through the Application of Digital Marketing and Product Innovation in the VUCA Era: A Study of SMEs in Sukabumi City. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 3(4 SE-Articles), 366–383. <https://doi.org/10.47353/ijema.v3i4.346>
- Maulana, R., Alhidayatullah, A., Setiadi, S., & Silvia Sunandar, R. (2025). Analysis of the Influence of Digital Marketing and Product Innovation on MSME Business Sustainability. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 4(2 SE-Articles). <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/isc-beam/article/view/61566>
- Nopriani, A. (2025). *Partisipasi Generasi Muda Dalam Mewujudkan Demokrasi Berkualitas*. 2(1).
- Nursaid, A. (2020). *Evaluasi pendidikan politik yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum daerah pada pilkada tahun 2020 di kabupaten karawang provinsi jawa barat*. 1–11.
- Panggabean, J. C., Roihansyah, D., & Surbakti, R. T. (2026). *Analisis Hakikat dan Implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia : Studi Literatur Analysis of the Nature and Implementation of Pancasila Democracy in Indonesia : A Literature Study*. 2765–2776.
- Prakoso, S., & Setiadi, S. (2026). DATA-DRIVEN STRATEGY : HOW BIG DATA SAVES TOURIST DESTINATIONS FROM ENVIRONMENTAL DEGRADATION. 2(2), 404–415.
- Prasetyo, D. (2026). *Hakikat dan Urgensi Pendidikan Politik dalam Masyarakat Demokratis di Era Disrupsi Digital*. 2, 1–24. <https://doi.org/10.47256/jhnb.v3i2.1203>
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). *Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan*. 3, 427–442.
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ahmad, R., & Ashfaq, A. (2020). *Media Sosial dan Digitalisasi Partisipasi Politik pada Generasi Muda : Perspektif Indonesia*. 8(1), 87–97.
- Setiadi, S. (2026). *Enhancing Customer Loyalty : The Mediating Effect of Experience on Usability , Security , and Content Quality with Digital Literacy Moderation*. 14(1), 1513–1526. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v14i1.4909>
- Setiadi, S., Alhidayatullah, & Maulana, R. (2025). *Towards the Sustainability of Food MSMEs through Strengthened Collaboration and Competitiveness*. 3(4), 331–345.
- Setiadi, S., Alhidayatullah, & Maulana, R. (2025). The Role of Collaboration in Overcoming MSME Challenges: Model Analysis to Improve Competitiveness and Sustainability. *International Journal of Science and Society*, 7(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i3.1520>



-
- Setiadi, S., Maulana, R., & Hidayat, S. (2025). Dampak Pungutan Desa terhadap Aset dan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(2), 160–180. <https://doi.org/10.37150/jimat.v6i2.3732>
- Setiadi, S., Widyastuti, S., Zulkifli, & Darmansyah. (2025). Sustainable nature tourism transformation: The strategic role of green tourism in West Java. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), 1544–1569. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5599>
- Simamora, M., Alya, B. Z., Andi, J., Lase, P., & Ramadhan, T. (2025). *Menegakkan Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Demokrasi : Berani Tolak Politik Uang*. 4.
- Syarif, M. A. (2016). PENGARUH SOSIALISASI POLITIK DAN STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PADA AIR PUTIH KOTA SAMARINDA. 4(4), 547–561.
- Tatang, P., Darna, N., Maulana Yusuf, I., & Budiman, H. (2018). *Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2018*.
- Widianto, A., Hidayat, A., & Sa, M. (2026). *Kajian Politik pada Generasi Z : Menelisik Pengaruh Efikasi Politik dan Literasi Digital terhadap Perilaku Memilih di Indonesia*. 6(1), 226–245. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v6i12026p226-245>
- Wulandari, F. (2025). PENGARUH EFIKASI POLITIK DAN LOCUS OF CONTROL.